

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwiyanto, Djoko. 2009. *Kraton Yogyakarta Sejarah, Nasionalisme, & Teladan Perjuangan*, Yogyakarta : Paradigma Indonesia
- Heywood, Andrew. 2014. *Politik Edisi Keempat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hediansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika.
- Ljiphart, Arend. 1999. *Patterns of Democracy : Government Forms and Performance in Thirty Six Countires*, New Heaven & London : Yale University Press
- Murhaini, Suriansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mawhood, P., ed., 1993. *Local Government in the Third World*. 2nd ed. Pretoria: Africa Institute of South Africa.
- Plaza Informasi. 2014. *Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Kerangka Peraturan Perundang – undangan*, Yogyakarta : Dishubkominfo
- Suwanda, D & Piliang, A.K. 2016. *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif*, Bandung : Rosdakarya
- Sulaiman, K.F. 2013. *Sistem Bikameral dalam Spektrum Lembaga Parlemen*, Yogyakarta : UII Press
- Sulaiman, K.F. 2017. *Teori Peraturan Perundang – Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta : Thafa Media

Jurnal

- Agung, dkk, Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia, (Jakarta : Kemitraan, 2008)
- Andriana, N. (2016). PEMILU DAN RELASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2)

- Arifin, M., & Widiastuti, A. (2016). Pengawasan DPRD dan Pelaksanaan Perda Anggaran di Kabupaten Jepara Tahun 2013.
- Aritonang, Dinoroy M., Implementasi Pengawasan Melekat dan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Implementation of Internal and Functional Controlling on Implementation of Local Government) (December 2, 2014). *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. XI, No. 3, December 2014.
- Coryanata, I. (2016). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(2),
- Hadi, S. (2013). FUNGSI LEGISLASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat). *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(18).
- Hadi, S. (2015). Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia (Studi Terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945). *Mimbar Keadilan*.
- Irwansyah. (2017). Kewenangan Kasultanan di Bidang Pertanahan di DIY. *Jurnal Government and Public Policy*.
- Kumorotomo, W. (2015). Memperbaiki Mekanisme Kawal Dan Imbang (Checks And Balances) dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 11(1), hlm 2
- Lotulung, Paulus Effendi. (1993). Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah. Citra Aditya bakti. Bandung.
- Mawardi, M. A. (2008). Pengawasan dan Keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan RI. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 15(1).
- Nuryanti, Sri. (2015). *Intervensi Penyelenggaraan Pemilukada : Regulasi, Sumberdaya dan Eksekusi*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 19 No. 2
- Onyebuchi, U. R. (2013). EXECUTIVE, LEGISLATIVE RELATIONS IN

PARLIAMENTARY AND PRESIDENTIAL GOVERNMENT. *Global Journal of Arts Humanities and Social Sciences*, 1(3)

Paryanto. (2017). Dinamika Politik Keistimewaan di DIY Pasca UU No. 13 Tahun

2012. *Jurnal Government and Public Policy*

Purnama, E. (2017). Lembaga Perwakilan dan *Checks and Balances* dalam Kekuasaan

Negara. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*

Putri, F. S., Basri, H., & Arfan, M. (2016). Pengaruh *Personal Background, Political*

Background dan Pemahaman Anggota DPRA Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Terhadap Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Legislatif Di Pemerintah Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi*

Ratnawati, T. (2012). Antara "Otonomi" Sultan dan "Kepatuhan" pada Pusat di Era

Reformasi: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Jurnal Pascasarjana: GOVERNANCE*, 2(1).

Tryatmoko, M. W. (2016). Problematika Peran Ganda Gubernur di Daerah Otonomi

Khusus. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(2)

Wibowo, S. A. (2015). Pengaruh Personal Background, Pengetahuan Dewan Tentang

Anggaran, dan Political Culture terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 13(1)

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY

Keputusan DPRD DIY Nomor 8/K/DPRD/2017 Tentang Rekomendasi DPRD DIY

Tentang Hasil Pengawasan UUK DIY

Internet

UU Keistimewaan Yogyakarta Akhirnya disahkan,

diakses <https://www.merdeka.com/politik/uu-keistimewaan-yogyakarta-akhirnya-disahkan.html> pada 27 Februari 2017

UUK DIY disahkan, Keraton Siap Reformasi dan Transparansi,

diakses <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/12/08/31/m9m5af-uuk-diy-disahkan-keraton-siap-reformasi-dan-transparansi> pada 27 Februari 2017

Sultan HB X :Pelantikan ini bersejarah,

diakses <http://jogja.tribunnews.com/2012/10/10/sultan-hb-x-pelantikan-ini-sejarah> pada 1 Maret 2017

Sultan Sebut Media Salah Tafsir Soal Perda Istimewa,

diakses <http://www.beritasatu.com/hukum/261997-sultan-sebut-media-salah-tafsir-soal-perda-istimewa-yogyakarta.html> diakses pada 1 Maret 2017

Polemik Raperdais Keraton Bantah Akan Ambil Paksa Sultan *Ground*,

diakses <http://news.okezone.com/read/2016/11/29/510/1553848/polemik-raperdais-keraton-bantah-akan-ambil-paksa-tanah-sultan-ground> pada 1 Maret 2017

DPRD DIY bentuk Pansus Pengawasan Pelaksanaan UUK,

diakses <http://jogja.tribunnews.com/2017/01/10/dprd-diy-bentuk-pansus-pengawasan-pelaksanaan-uuk> pada 1 Maret 2017

Gubernur Tolak Rekomendasi Pengawasan DPRD DIY,

Diakses <https://www.radarjogja.co.id/gubernur-tolak-rekomendasi-pansus-pengawasan-uuk/> pada 16 Maret 2017